

BAB I.

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi digital dan globalisasi abad ke-21 telah menghadirkan paradigma baru dalam pendidikan global, karena keduanya secara fundamental mengubah cara pengetahuan diproduksi, diakses, dan digunakan dalam kehidupan sosial, ekonomi, serta dunia kerja. Pengetahuan tidak lagi bersifat statis dan terbatas pada ruang kelas, tetapi berkembang secara cepat, terbuka, dan lintas batas melalui platform digital.

Akibatnya, pendidikan tidak cukup hanya berorientasi pada transfer informasi, melainkan harus menekankan pengembangan kompetensi. Menghadapi realita tersebut (World Economic Forum, 2023), menekankan pentingnya pengembangan kompetensi, seperti berpikir kritis, kreativitas, inovatif dan kolaboratif, sebagai bekal utama untuk menghadapi tantangan kompleks abad ke-21, termasuk krisis iklim dan ketimpangan sosial.

Lebih lanjut (UNESCO, 2021), menyerukan terbentuknya *new social contract for education* yang menggeser fokus dari pencapaian akademis semata ke pengembangan potensi holistik melalui kolaborasi. Dalam konteks ini, pembelajaran ramah anak menjadi pendekatan krusial karena mampu menciptakan lingkungan belajar yang aman, inklusif, dan partisipatif (Fahyuni & Nurdyansyah, 2020), yang secara epistemologis merupakan realisasi dari prinsip pendidikan dimana pembelajaran berpusat pada siswa dan Pendidikan harus menyesuaikan

dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kebutuhan masyarakat serta dunia kerja.

Paradoksnya, tantangan terbesar dalam mengimplementasikan konsep ini di Indonesia bersifat multidimensi dan tidak dapat dianggap remeh. Indonesia menempati posisi rendah dalam (PISA, 2022), dengan skor matematika 366, membaca 359, dan sains 383 semuanya jauh di bawah rata-rata OECD (472, 476, dan 485), menunjukkan tantangan signifikan dalam kompetensi dasar siswa. Hasil capaian ini disebabkan sekolah masih bergantung pada buku teks yang ketinggalan zaman atau kurang relevan dengan kebutuhan belajar siswa. Guru kurang mendapat pelatihan atau akses pengembangan profesional, sehingga metode pengajaran kurang efektif.

Ironisnya, kompetensi guru di Indonesia masih terjebak pada anggapan bahwa guru yang kompeten adalah guru yang telah tersertifikasi. Dalam laporannya (Word Bank Group, 2015), melaporkan meskipun jutaan guru telah mengikuti sertifikasi (sekitar 200.000 per tahun), tidak terlihat peningkatan signifikan pada hasil belajar siswa. Hal ini menunjukkan bahwa sertifikasi belum efektif sebagai instrumen peningkatan mutu pendidikan. Kualitas guru justru lebih ditentukan oleh penguasaan materi, kompetensi pedagogik yang nyata, serta kemampuan mengajar yang terbukti berdampak pada peningkatan hasil belajar siswa. Karena itu, ukuran formal seperti sertifikasi tidak dapat dijadikan satu-satunya indikator kualitas guru. Berbagai fakta di lapangan justru menunjukkan adanya kesenjangan antara kebijakan dan realitas pembelajaran.

Realitas di lapangan menunjukkan bahwa kualitas pendidikan tidak hanya tercermin dari kompetensi guru, tetapi juga dari kondisi lingkungan sekolah,

termasuk persoalan perilaku sosial seperti bullying. Sebagai contoh, berdasarkan data (UNICEF, 2025), prevalensi perundungan pada siswa usia 13–15 tahun mencapai 21%, dengan persentase korban perempuan (24%) lebih tinggi dibandingkan laki-laki (19%). Di samping itu, laporan (WHO, 2025), menunjukkan bahwa satu dari tujuh remaja mengalami gangguan mental akibat tekanan sosial.

Kendati telah ada kebijakan seperti (PermenPPPA Nomor 7, 2024), tentang Sekolah Ramah Anak, implementasinya di lapangan masih menghadapi kendala serius. Hal ini tercermin dalam data (KPAI, 2025), yang mencatat dari 2.057 pengaduan, sebanyak 241 kasus (11,7%) terkait pelanggaran hak anak di bidang pendidikan, dengan mayoritas merupakan kasus bullying. Kondisi ini menegaskan adanya kesenjangan signifikan antara regulasi yang ada dan praktik nyata di sekolah.

Untuk merealisasikan peran kunci tersebut, sekolah membutuhkan kerangka kerja yang jelas dan mendukung. Salah satu indikator fundamental dari sekolah ramah anak adalah adanya kebijakan atau tata tertib yang secara spesifik mencantumkan aturan anti-kekerasan, anti-perundungan, dan anti-diskriminasi, sebagaimana diatur dalam (Permen PPPA Nomor 8, 2014). Kebutuhan akan kebijakan ini semakin mendesak mengingat realitas di lapangan yang semakin memprihatinkan. Dalam kajiannya (Gunawan, 2023), menegaskan bahwa perundungan di Indonesia telah mencapai tahap ekstrem yang mengancam nyawa, sehingga diperlukan reoptimalisasi kebijakan melalui pendekatan *restorative justice*.

Oleh karena itu, sekolah harus menyediakan mekanisme pengawasan dan pengaduan yang tegas untuk mencegah normalisasi kekerasan. Pada titik inilah,

implementasi mekanisme tersebut secara efektif pada akhirnya bergantung pada kesiapan serta karakteristik guru dalam mengelola setiap interaksi di dalam kelas.

Sikap partisipatif, inklusif, dan humanis yang ditunjukkan guru di ruang kelas merupakan pilar utama keberhasilan implementasi pembelajaran ramah anak (Syifaurrahmah et al., 2025). Untuk mewujudkan sikap tersebut, diperlukan dua faktor internal yang saling terkait sebagai landasannya: otonomi profesional guru yaitu kebebasan profesional dalam merancang pembelajaran dan pengambilan keputusan pedagogis serta resiliensi guru berupa ketahanan psikologis menghadapi tekanan administratif dan dinamika kelas.

Menurut (Undang-Undang Nomor 14, 2005), pasal 14 ayat (1) bahwa otonomi guru di Indonesia mencakup dimensi luas yang meliputi kebebasan profesional dalam memberikan penilaian, kemandirian menentukan kelulusan, serta hak mengelola proses pembelajaran secara mandiri. Landasan hukum ini menegaskan peran guru sebagai pendidik profesional, bukan sekadar pelaksana instruksi teknis. Dalam praktiknya, otonomi tersebut memanifestasikan kebebasan pedagogis yang memungkinkan guru menerapkan pembelajaran diferensiasi, seperti pengelompokan fleksibel dan penyesuaian kompleksitas tugas. Strategi ini, sebagaimana dikaji oleh (Goyibova et al., 2025), terbukti efektif dalam meningkatkan motivasi serta performa akademik siswa melalui pendekatan yang lebih individual dan inklusif.

Di samping otonomi, faktor kedua yang tak kalah krusial adalah resiliensi guru. Sebagai penggerak antusiasme, guru yang resilien mampu mengolah tekanan kerja menjadi energi positif, sehingga menciptakan lingkungan belajar yang inspiratif dan menjaga motivasi siswa tetap konsisten (Nafiati & Hendaryati, 2024).

Resiliensi ini merupakan fondasi utama keberhasilan guru yang tidak muncul secara instan, melainkan melalui proses dinamis dan kolaborasi tiga faktor penting: kesadaran emosi, regulasi emosi, dan hubungan transenden (M. Sembiring, 2020).

Lebih dari itu, resiliensi mencakup kemampuan esensial guru untuk memulihkan diri dari kegagalan implementasi di lapangan (Yanti et al., 2023). Kapasitas untuk bangkit dari hambatan teknis ini menciptakan sinergi yang sangat krusial dengan otonomi guru dalam membentuk sikap profesional yang berkelanjutan. Pada dasarnya, otonomi tanpa resiliensi berisiko membuat inovasi mandek saat tantangan muncul, sementara resiliensi tanpa otonomi hanya akan menghasilkan ketahanan pasif tanpa inisiatif perubahan (Garrido et al., 2025). Dengan demikian, integritas antara ketangguhan mental dan kebebasan bertindak menjadi syarat mutlak bagi guru dalam menghadapi dinamika pendidikan yang terus berubah.

Secara konseptual, otonomi dan resiliensi guru merupakan aspek krusial dalam membentuk sikap yang mendukung pembelajaran ramah anak. Namun, analisis empiris di Yayasan Budi Mulia Lourdes (Jakarta dan Bogor) mengungkapkan kesenjangan signifikan antara idealitas tersebut dengan realitas lapangan. Berdasarkan analisis dokumen, regulasi yang berlaku masih didominasi oleh mekanisme sanksi berbasis skor yang berfokus pada akumulasi pelanggaran. Dokumen tata tertib tersebut belum secara eksplisit mengakomodasi prinsip perlindungan anak yang inklusif serta pengakuan hak-hak siswa.

Kelemahan regulasi ini diperparah oleh minimnya dukungan struktural dan finansial dari pihak yayasan. Gaya kepemimpinan yang bersifat birokratis-instruksional dengan kontrol kurikulum yang kaku menciptakan sistem pendidikan

yang mekanistik. Sistem ini lebih terobsesi pada indikator kuantitatif, seperti standar ujian dan ketuntasan tinggi, daripada kesejahteraan (well-being) serta pengembangan karakter siswa. Selain itu, alokasi anggaran untuk program pengembangan kapasitas guru cenderung tidak berkelanjutan. Meskipun pelatihan tersedia, pelaksanaannya sering kali tidak berbasis analisis kebutuhan riil sehingga dampaknya terbatas terhadap perubahan praktik mengajar.

Dalam ekosistem yang menekan ini, guru menjadi aktor utama yang paling terdampak. Implementasi Kurikulum Merdeka yang alih-alih memberikan otonomi, justru menambah beban administrasi digital melalui Learning Management System (LMS) dan keterikatan pada Alur Tujuan Pembelajaran (ATP) yang terpusat. Para guru menghabiskan hingga 50% waktu kerja mereka hanya untuk urusan birokrasi. Beban administratif yang eksekutif ini secara langsung mereduksi kapasitas mereka untuk berperan sebagai pendamping emosional siswa. Akibatnya, Rapor Mutu Pendidikan menunjukkan bahwa indeks well-being guru hanya berada pada kategori "cukup".

Kondisi tersebut memicu diskrepansi kapasitas adaptasi yang tajam antargenerasi guru. Observasi lapangan mengungkapkan bahwa guru senior dengan strategi bertahan (coping) yang mapan cenderung lebih tangguh. Sebaliknya, guru muda lebih rentan mengalami stres akibat minimnya akses layanan konseling dan manajemen stres. Mayoritas guru juga kurang mampu mengidentifikasi bahwa emosi pribadi mereka dapat mengganggu kualitas interaksi dengan siswa di kelas.

Tekanan psikologis dan keterbatasan waktu akhirnya mendorong guru mencari jalan pintas yang pragmatis. Banyak guru mengunduh modul pembelajaran dari sumber lain tanpa modifikasi, lalu mengajar secara situasional dengan

mengandalkan metode konvensional. Praktik mengajar pun didominasi oleh pendekatan satu arah seperti ceramah. Sebenarnya, rasio buku teks terbaru per siswa sudah tercukupi dan akses internet untuk riset mandiri tersedia luas. Namun, keterbatasan fleksibilitas guru membuat pemanfaatan sumber daya digital dan inovatif tersebut menjadi tidak optimal.

Kegagalan adaptasi mengajar ini berimplikasi langsung pada iklim kelas dan sistem perlindungan siswa. Integrasi pendekatan keamanan psikologis belum membudaya, sehingga siswa enggan aktif bertanya atau melaporkan kekerasan. Dinamika kelas yang tampak kondusif lebih dipicu oleh rasa takut siswa terhadap sanksi, bukan karena lingkungan belajar yang sehat. Akibatnya, kasus perundungan cenderung kurang terdeteksi. Masalah ini diperparah oleh tidak adanya kanal pengaduan anonim serta dokumentasi rekam medis oleh guru Bimbingan Konseling yang belum terstruktur dengan baik.

Pada tingkat kebijakan sekolah, penanganan masalah siswa belum menerapkan SOP Restorative Justice. Pendekatan penanganan di enam dari tujuh sekolah yang diteliti masih bersifat punitif dan reaktif, seperti langsung memanggil orang tua tanpa adanya tindakan preventif yang terintegrasi. Di tingkat SD, mekanisme pencegahan formal bahkan belum tersedia sama sekali. Sementara di tingkat SMP dan SMA, implementasi regulasi masih lemah dan minimalis. Faktanya, sekitar 80% Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK) hanya berfungsi sebagai formalitas administratif, bukan instrumen perlindungan yang efektif di lapangan.

Pada titik ini, keberhasilan implementasi pembelajaran ramah anak bermuara pada satu kesimpulan fundamental: sikap dan disposisi internal guru

adalah kunci utamanya. Kesenjangan antara regulasi dan praktik menunjukkan bahwa otonomi pedagogis yang terbatas serta tekanan administratif berdampak langsung pada ketahanan psikologis guru di kelas. Oleh karena itu, otonomi dan resiliensi menjadi dua dimensi internal strategis yang menentukan bagaimana guru membentuk, mempertahankan, dan mengaktualisasikan sikap pro-pembelajaran ramah anak yang aman serta inklusif secara konsisten.

Kajian mengenai pembelajaran ramah anak selama ini lebih banyak berfokus pada evaluasi program tingkat institusional, seperti kebijakan Sekolah Ramah Anak dan prevalensi kasus perundungan di sekolah. Sebaliknya, dimensi internal psikologis guru, khususnya keterkaitan antara otonomi pedagogis dan resiliensi dengan sikap pro-pembelajaran ramah anak itu sendiri masih jarang dianalisis. Padahal, otonomi dalam pengambilan keputusan memungkinkan guru menyelaraskan nilai-nilai pedagogis pribadi dengan tindakan di kelas, sementara resiliensi berperan menjaga stabilitas sikap positif tersebut di tengah tingginya tuntutan kerja. Kedua dimensi ini berpotensi besar dalam membentuk kecenderungan bertindak guru untuk mewujudkan pembelajaran yang berorientasi pada kesejahteraan siswa.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pola hubungan antara Otonomi Guru dan Resiliensi Guru dengan Sikap Pro-Pembelajaran Ramah Anak. Kajian terdahulu oleh (Intifadhah & Wirza, 2020), telah membuktikan bahwa otonomi internal dan eksternal berperan penting dalam meningkatkan keterlibatan guru pada pengambilan keputusan di sekolah. Namun, ruang lingkup studi tersebut masih terbatas pada ranah partisipasi manajerial dan belum mengaitkannya dengan pembentukan sikap spesifik guru terhadap model pembelajaran tertentu. Di sisi lain,

pengintegrasian variabel otonomi bersama resiliensi dalam memberi kontribusi Sikap Pro-Pembelajaran Ramah Anak secara simultan masih belum pernah dilakukan.

Kebaruan penelitian ini terletak pada penggabungan kedua faktor internal tersebut dalam satu kerangka analitis. Pendekatan ini secara fundamental berbeda dengan studi (Murti & Winarti, 2023), yang cenderung menitikberatkan pemecahan masalah pada aspek eksternal-metodologis melalui perancangan strategi dan model pembelajaran berbasis proyek. Pendekatan ini juga berbeda dengan kajian (Efianingrum et al., 2023), yang memetakan tujuh aspek resiliensi guru dalam koridor ketangguhan profesi secara umum. Melalui pemodelan integratif ini, penelitian ini memberikan perspektif baru mengenai bagaimana karakteristik profesional berupa otonomi pedagogis dan karakteristik psikologis berupa resiliensi saling berkelindan dalam membentuk orientasi sikap guru yang inklusif di dalam kelas.

Urgensi memetakan hubungan antarvariabel ini menjadi sangat relevan pada guru-guru di Yayasan Budi Mulia Lourdes (Jakarta dan Bogor). Sebagai tenaga pendidik yang dituntut mengadopsi pembelajaran ramah anak secara formal, mereka masih menghadapi tantangan nyata dalam membentuk sikap yang konsisten. Berdasarkan studi pendahuluan melalui survei singkat terhadap sejumlah guru di sekolah yayasan tersebut, ditemukan bahwa 65% responden merasa sikap ideal mereka terhadap pembelajaran ramah anak sering kali terhambat oleh keterbatasan otonomi akibat beban administratif, sementara hasil wawancara mengonfirmasi adanya gejala kejenuhan (burnout) yang mengikis resiliensi mereka untuk mempertahankan sikap positif tersebut. Dinamika empiris pada level individu

guru inilah yang menjadikan sekolah-sekolah tersebut sebagai lokus yang representatif. Analisis terhadap faktor internal ini diharapkan dapat mengisi celah teoretis, sekaligus memperkuat landasan bagi pengambil kebijakan dalam memahami profil psikologis guru yang mendukung keberhasilan visi pembelajaran ramah anak.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka permasalahan penelitian ini dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Tingginya angka kekerasan di lingkungan pendidikan, yang dibuktikan dengan prevalensi perundungan mencapai 21% dan meningkatnya gangguan mental pada remaja akibat tekanan sosial.
2. Kesenjangan yang signifikan antara regulasi dan praktik, di mana kebijakan Sekolah Ramah Anak (SRA) dan PermenPPPA sering kali hanya menjadi formalitas administratif tanpa implementasi nyata di lapangan.
3. Mekanisme perlindungan siswa yang belum integratif, ditandai dengan belum tersedianya prosedur pencegahan formal di tingkat dasar serta penanganan kasus yang bersifat reaktif dan tentatif di tingkat menengah.
4. Lemahnya fungsi Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK) di sekolah, yang menyebabkan laporan kekerasan tidak tertangani dengan jaminan perlindungan bagi pelapor.
5. Rendahnya otonomi pedagogis guru, di mana mayoritas guru, sekitar 75% masih bergantung pada perangkat ajar unduhan yang tidak kontekstual dan kehilangan kemandirian dalam pengambilan keputusan di kelas.

6. Beban kerja administratif yang eksekutif, yang menghabiskan hingga 50% waktu kerja guru sehingga mereduksi peran guru sebagai pendamping emosional dan inspirator bagi siswa.
7. Gaya kepemimpinan sekolah yang birokratis-instruksional, yang lebih menekankan pada standar ujian dan indikator kuantitatif daripada kesejahteraan (*well-being*) guru.
8. Resiliensi guru yang belum optimal, terutama pada kalangan guru muda yang rentan mengalami stres kerja akibat tekanan Kurikulum Merdeka, keterbatasan akses layanan manajemen stres, serta belum optimalnya kemampuan dalam mengelola emosi pribadi.
9. Ketidaksiapan disposisi internal guru dalam mewujudkan pembelajaran ramah anak yang disebabkan oleh keterbatasan otonomi dan ketahanan psikologis (*resiliensi*).
10. Kecenderungan pembelajaran satu arah yang mengabaikan prinsip partisipatif, inklusif, dan humanis sebagai pilar utama Sekolah Ramah Anak.

1.3. Pembatasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah dan tidak melebar, maka permasalahan dibatasi pada hal-hal berikut:

1. Penelitian ini hanya memfokuskan pada dua faktor internal guru, yaitu Otonomi Guru dan Resiliensi Guru sebagai variabel independen, serta Sikap Pro-Pembelajaran Ramah Anak sebagai variabel dependen.

2. Subjek penelitian dibatasi pada guru tetap di lingkungan Yayasan Budi Mulia Lourdes, baik pada jenjang SD, SMP, maupun SMA, guna melihat gambaran sikap guru secara organisasional di bawah naungan yayasan yang sama.
3. Wilayah penelitian dibatasi pada satuan pendidikan di bawah naungan Yayasan Budi Mulia Lourdes yang berlokasi di wilayah Jakarta dan Bogor.
4. Fokus penelitian adalah pada aspek internal/psikologis dan profesionalisme guru, sehingga faktor eksternal seperti ketersediaan sarana prasarana sekolah, anggaran Sekolah Ramah Anak, maupun persepsi orang tua siswa tidak dianalisis secara mendalam dalam penelitian ini.
5. Analisis diarahkan untuk menemukan pola hubungan antar variabel baik parsial maupun simultan, bukan untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan Sekolah Ramah Anak secara makro di tingkat nasional.

1.4. Perumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi dan batasan masalah yang telah dijelaskan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah terdapat hubungan antara Otonomi Guru dengan Sikap Pro-Pembelajaran ramah anak di Sekolah Yayasan Budi Mulia Lourdes Jakarta dan Bogor?
2. Apakah terdapat hubungan antara Resiliensi Guru dengan Sikap Pro-Pembelajaran Ramah Anak di Sekolah Yayasan Budi Mulia Lourdes Jakarta dan Bogor?

3. Apakah terdapat hubungan secara bersama-sama antara Otonomi Guru dan Resiliensi Guru dengan Sikap Pro-Pembelajaran Ramah Anak di Sekolah Yayasan Budi Mulia Lourdes Jakarta dan Bogor?

1.5. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis:

1. Hubungan antara Otonomi Guru dengan Sikap Pro-Pembelajaran Ramah Anak di Sekolah Yayasan Budi Mulia Lourdes Jakarta dan Bogor.
2. Hubungan antara Resiliensi Guru dengan Sikap Pro-Pembelajaran Ramah Anak di Sekolah Yayasan Budi Mulia Lourdes Jakarta dan Bogor.
3. Hubungan secara simultan antara Otonomi Guru dan Resiliensi Guru dengan Sikap Pro-Pembelajaran Ramah Anak di Sekolah Yayasan Budi Mulia Lourdes Jakarta dan Bogor.

1.6. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan fokus dan tujuan yang telah ditetapkan, penelitian ini memiliki kegunaan bagi berbagai pihak diantaranya:

1. Bagi Mahasiswa.

Penelitian ini memperkaya pemahaman teoritis dan keterampilan analitis mahasiswa dalam bidang administrasi pendidikan, khususnya terkait otonomi institusi, resiliensi guru, dan pembelajaran berbasis hak anak..

2. Bagi Jurusan/Program Studi.

Penelitian ini menambah khazanah ilmiah dalam administrasi pendidikan serta menjadi referensi pengembangan kurikulum dan riset terkait otonomi sekolah dan resiliensi guru.

3. Bagi Universitas Kristen Indonesia (UKI).

Penelitian ini mendukung penguatan reputasi akademik UKI melalui kontribusi ilmiah yang relevan dengan isu-isu strategis pendidikan.

4. Bagi Yayasan Budi Mulia Lourdes.

Penelitian ini memberikan masukan berbasis bukti untuk pengembangan kebijakan, peningkatan kompetensi guru, dan penguatan ekosistem pembelajaran ramah anak.

5. Bagi Masyarakat Umum.

Penelitian ini dapat memberikan gambaran tentang pentingnya faktor internal guru dalam mendukung pendidikan ramah anak, sehingga dapat menjadi rujukan dalam pengembangan kebijakan, program pelatihan guru, maupun upaya peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia secara umum.

